

BAB II LANDASAN TEORI

A. Deskripsi Teori

1. Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)

Strategi struktur organisasi yang dikenal sebagai kepatuhan menggabungkan konsep dari paradigma manajemen partisipasi tradisional. Ketika hukum sesuai dan sesuai dengan standar internal mereka, orang lebih memilih untuk mengikutinya.¹ Aliran pemikiran yang dikenal sebagai teori kepatuhan berusaha untuk memahami mengapa beberapa orang mematuhi instruksi atau aturan yang diberikan kepada mereka. Setiap wajib pajak memiliki hak dan kewajiban yang harus dijunjung tinggi oleh pemerintah dan masyarakat; salah satu tanggung jawab tersebut adalah untuk menjamin bahwa sistem pajak diikuti.

Implementasi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sebagai bentuk tanggung jawab diharapkan terus berlanjut. Sebab warga yang manaati aturan ialah warga negara yang bertanggungjawab.² Menurut teori kepatuhan, pembayar pajak harus memenuhi semua kewajiban pajak mereka dan mengklaim semua keuntungan pajak mereka. Kewajiban Wajib Pajak adalah pelaksanaan kepatuhan perpajakan dalam rangka mendukung pembangunan. Mengingat bahwa teknik penilaian mandiri digunakan dalam sistem perpajakan Indonesia dan bahwa proses tersebut memberikan wajib pajak kepercayaan penuh atas kemampuan mereka untuk menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban mereka, kepatuhan wajib pajak sangat penting.

¹ Eunike Gratia Marentek and Heinke R N Wokas, 'Pengaruh Komite Audit, Ukuran Perusahaan Dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Pada Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2019)', *Emba*, 9.2 (2021), pp. 271–82.

² Azzy Abdul Azis and Intan Rahma Sari, 'Pengaruh Capital Intensity, Sales Growth Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bei Periode 2017 – 2021', *Transekonomika: Akuntansi, Bisnis Dan Keuangan*, 2.6 (2022), pp. 311–24, doi:10.55047/transekonomika.v2i6.289.

Wajib pajak yang memiliki kepatuhan tinggi dalam menyikapi atau merespon aturan yang berlaku dengan baik, dalam arti melaksanakan sesuai aturan. Sebaliknya wajib pajak kurang dalam merespon peraturan selalu mencari celah atas kelemahan suatu aturan sebagai bahan informasi untuk penghindaran pajak legal ataupun illegal. Oleh demikian, teori kepatuhan sebagai dasar teori variabel kepatuhan wajib pajak.³

Kepatuhan yang menjabarkan sebuah kondisi yang mana wajib pajak memiliki kewajiban terhadap perpajakan. kewajiban perpajakan yang berlandaskan aturan perundangan yang sudah diputuskan. Teori kepatuhan mungkin mendorong wajib pajak untuk mengikuti peraturan yang berlaku lebih dekat, termasuk penghindaran pajak. Jika wajib pajak patuh menyelesaikan kewajiban pajaknya, maka penerimaan pajak negara juga akan tinggi, dan penerimaan yang tinggi pasti akan berdampak positif bagi negara dan masyarakat.⁴

Wajib Pajak yang secara sukarela memilih untuk tidak melakukannya tidak ada. Orang akan mengambil tindakan jika mereka mendapat kesempatan untuk mendapatkan keuntungan darinya. Mengingat hal ini, eksekutif, yang mengawasi semua aktivitas bisnis, hanya akan menggunakan strategi penghindaran pajak jika mereka ingin mendapatkan keuntungan dari melakukannya. Akibatnya, salah satu metode terbaik untuk mengurangi pajak perusahaan adalah dengan membayar gaji CEO yang besar. Sebab, remunerasi yang lebih tinggi bagi para pemimpin akan semakin mendorong kinerja bisnis.⁵

³ Poppy Adelia Fadhilah, Drs Sugeng Riyadi, and M Si, 'Pertanggungjawaban Sosial Perusahaan , Komisaris Independen , Capital Intensity Ratio , dan Umur Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Aneka Industri Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-20' , 2016.

⁴ Enawati Desi and Purwaningsih Eny, 'Pengaruh Profitabilitas, Tingkat Hutang Dan Intensitas Aset Tetap Terhadap Penghindaran Pajak', *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 6.2 (2022), pp. 494–512.

⁵ SriLestari Yuli P and Irmayani, 'Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak (Studi Kasus Perusahaan Property, Realestate, Dan Building Construction Dibursa Efek Indonesia 2018-2020)', *Proceeding of National*

2. Tax Avoidance

Bantuan pajak adalah upaya menurunkan jumlah pajak untuk dibayar melalui pemanfaatan pengecualian hukum. Penghindaran pajak yang dilakukan secara sah melalui penggunaan celah dalam kode pajak untuk menghindari pelanggaran atau bertentangan dengan hukum dikenal sebagai bantuan pajak. Baik pembayar pajak perorangan maupun badan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap aliran pendapatan negara di bidang pajak. Negara dapat menggunakan uang pajak ini untuk membayar semua pengeluarannya, termasuk biaya reguler dan modal.

Selain itu, sebagaimana disebutkan dalam Pembukaan UUD 1945, membayar biaya pajak ialah simbol ketaatan warga dan peran wajib pajak dalam memenuhi tanggung jawab keuangan dengan segera dan kooperatif untuk keuangan negara dan pembangunan nasional. Investigasi berlanjut ke salah satu jenis penghindaran pajak, penghindaran pajak. jangkauan hukum perpajakan. Karena Wajib Pajak melakukan tindakan yang diperbolehkan oleh Undang-Undang Perpajakan sebagai upaya untuk mengurangi, menghindari, memperkecil, atau sebaliknya meringankan beban pembayaran pajak⁶

Perusahaan menggunakan penghindaran pajak sebagai taktik untuk menurunkan jumlah pajak yang harus dibayar. Ini dianggap sah dan tidak bertentangan dengan hukum apa pun. Dengan kata lain, perusahaan menggunakan pengurangan dan pembebasan pajak untuk membayar lebih sedikit pajak secara keseluruhan. Meski legal, pemerintah menghadapi teka-teki karena pajak bisnis merupakan

Conference on Accounting & Finance, 4 (2022), pp. 243–55, doi:10.20885/ncaf.vol4.art31.

⁶ Dian Eva Marlinda, Kartika Hendra Titisari, and Endang Masitoh, 'Pengaruh Gcg, Profitabilitas, Capital Intensity, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance', *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4.1 (2020), p. 39, doi:10.33087/ekonomis.v4i1.86.

mayoritas pengeluaran pemerintah, yang menurunkan pendapatan negara.⁷

Bisnis dapat menggunakan penghindaran pajak untuk secara legal meminimalkan kuantitas pajak yang wajib mereka bayar agar tetap mematuhi semua hukum pajak yang berjalan. Banyak bisnis mematuhi standar efisiensi yang ketat dalam hal biaya pajak karena mereka lebih fokus pada peningkatan keuntungan daripada yang lainnya. Kemampuan bisnis untuk mengelola asetnya secara menguntungkan, atau untuk menghasilkan Pengembalian Aset (ROA), disebut sebagai profitabilitas. ROA yang sehat menunjukkan bahwa aset operasi perusahaan secara keseluruhan mampu menghasilkan laba. Semakin besar angka ROA yang dinyatakan dalam persentase, maka semakin baik kinerja bisnis tersebut.

Laba berfungsi sebagai dasar untuk perpajakan; semakin banyak pendapatan perusahaan, semakin banyak pajak yang harus dibayar. Ukuran keseluruhan perusahaan mungkin menunjukkan jika suatu bisnis terlibat dalam penghindaran pajak. Skala yang dikenal sebagai "ukuran perusahaan" membagi ukuran perusahaan menjadi sejumlah variabel, seperti totalsaset, penjualansbersih, serta kapitalisasipasar. Ketika arus kas bisnis tumbuh berprospek baik diantisipasi kurun waktu cepat, maka telah matang dan memiliki basis total aset yang besar. Karena pengawasan pemerintah yang ketat, organisasi yang digolongkan sebagai perusahaan besar cenderung membatasi tindakan pajak yang agresif.⁸

Ada beberapa strategi untuk mengurangi beban pajak, mulai dari yang masih dalam parameter aturan pajak hingga yang melanggar. Perencanaan pajak (tax planning) mengacu pada upaya pengurangan pajak. Perencanaan pajak adalah proses menyesuaikan bisnis dan transaksi wajib pajak sehingga kewajiban pajak dijaga seminimal mungkin sambil tetap berada dalam undang-undang perpajakan.

⁷ Sarasati Dea Hayu and Asyik Nur Fadjrih, 'Pengaruh Good Corporate Governance, Profitabilitas, Likuiditas, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance', *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 7. Januari (2018), pp. 7–20.

⁸ Gina and Purnama.

Beberapa variabel antara lain mendorong wajib pajak agar melakukan penghematan pajak dengan tidak sah.:

- a. Jumlah pajak yang harus dibayarkan
Semakin besar jumlah pajak yang wajib dibayarkan oleh wajib pajak, semakin besar kemungkinan wajib pajak akan melanggar.
- b. Biaya menyusup fiskus
Semakin rendah biaya menyusup ke otoritas pajak, semakin besar kemungkinan wajib pajak akan melanggar.
- c. Kemungkinan untuk terdeteksi
Kemungkinan wajib pajak melanggar hukum meningkat karena kemungkinan deteksi akan melanggar menurun.
- d. Besar sanksi
Wajib Pajak lebih mungkin untuk melanggar hukum ketika hukuman untuk melakukannya kurang berat.

Komite urusan fiskal *Organizationsfor Economic Cooperationsand Developments* (OECD) memberikan 3 rincian penghindaran pajak:

- a. Ada aspek artifisialsdalam yang menyebabkan pengaturan tertentu muncul ada sebenarnya tidak ada, lalu dilakukan dengan tidak adanya faktor pajak.
- b. Menggunakan celah aturan dengan menjalankan peraturan hukum untuk maksud selain yang dimaksudkan oleh proses pembuatan hukum.
- c. Konsultan memperagakan alat atau cara penggelapan pajak dengan syarat Wajib Pajak menyembunyikannya semaksimal mungkin.⁹

Sebaliknya, nilai CETR yang rendah menunjukkan jumlah penggelapan pajak yang tinggi. Angka CETR yang tinggi menunjukkan tingkat penggelapan pajak yang rendah. dihitung dengan mengurangi jumlah yang dibayarkan untuk pajak penghasilan dari jumlah yang diperoleh sebelum

⁹ Sri Mulyani, Anita Wijayanti, Endang Masitoh, 'Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance (Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di BEI)', *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Airlangga*, 3.1 (2018), 322–40 <<https://doi.org/10.31093/jraba.v3i1.91>>.

pajak (labassebelum pajak). Perhitungan CashsEffectivesTax Rate (CETR) adalah sebagai berikut:

$$CETR = \frac{\text{pembayaran pajak}}{\text{pre tax income}}$$

3. Likuiditas

Likuiditas adalah kapasitas organisasi untuk memenuhi kewajiban langsungnya. Likuiditas perusahaan, yang melekat kepada arus kas jangka pendek demi kewajiban serta aset lancar bisnis, menentukan kapasitasnya untuk menghasilkan uang tunai dalam waktu dekat untuk memenuhi komitmennya. Rasio yang disebut likuiditas mengungkapkan bagaimana uang bisnis dan aset serta kewajiban lancar lainnya berhubungan satu sama lain. Kemampuan korporasi untuk memenuhi kewajiban jangka pendek, baik internal maupun eksternal, disebut sebagai likuiditas. Makna lain, likuiditas adalah kemampuan bisnis dalam melunasi hutang pada saat jatuh tempo.¹⁰

Rasio likuiditas mengukur kemampuan bisnis dalam membayar hutang cepat. Rasio ini membandingkan aset saat ini yang dapat digunakan untuk membayar komitmen jangka pendek dengan aset tersebut. Likuiditas yang kuat menunjukkan bahwa arus kas bisnis konsisten. Perusahaan tidak akan kesulitan memenuhi kewajiban jangka pendeknya, seperti kewajiban memenuhi pajak sesuai hukum dan peraturan yang berlaku, berkat perputaran kas yang besar.¹¹

Kapasitas bisnis untuk memenuhi komitmen keuangannya terlepas dari aset yang ada dikenal sebagai likuiditas. Saat mengelola keuangan organisasi, likuiditas dipandang sebagai indikator kinerja manajemen. Rasio likuiditas yang signifikan menunjukkan bahwa arus kas bisnis konsisten. Pemerintah mengantisipasi bisnis lewat rasio likuiditas puncak dapat memenuhi keharusan

¹⁰ Tresna Syah Rozak, Hardiyanto Arief Tri, and Fadilah Haqi, 'Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Dan Leverage Terhadap Tax Avoidance', *Neuropsychology*, 3.8 (2017), pp. 85–102.

¹¹ Candra Febrilyantri, 'Pengaruh Likuiditas, Leverage, Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Sub-Sektor Otomotif Tahun 2018-2021', *Journal of Islamic Banking and Finance*, 2, 2022, pp. 128–41.

perpajakannya tepat waktu, sehingga dapat mengumpulkan pendapatan yang dianggarkan dalam APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Meskipun perusahaan mampu membayar pajak, rasio likuiditas yang tinggi tidak menjamin akan melakukannya karena manajemen dapat memanfaatkan setiap peluang untuk meningkatkan laba bersih.¹²

Rasio likuiditas mengevaluasi kapasitas perusahaan untuk memenuhi komitmen segera. Rasio ini membandingkan aset saat ini yang dapat digunakan untuk membayar komitmen jangka pendek dengan aset tersebut. Bisnis dengan likuiditas yang kuat menunjukkan arus kas yang stabil. Perusahaan tidak akan kesulitan memenuhi tanggung jawab jangka pendeknya, seperti kewajiban membayar pajak sesuai aturan dan regulasi yang ada, jika memiliki arus kas yang sehat.¹³

$$\text{Current Ratio} = \frac{\text{aset lancar}}{\text{hutang lancar}} \times 100\%$$

4. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan adalah hitungan untuk dipakai mengkategorikan usaha besar kecil berdasarkan beberapa ukuran. Ukuran perusahaan menunjukkan kemampuannya untuk membuat penilaian pajak. Ukuran korporasi mencerminkan stabilitas dan kemampuannya untuk melakukan kegiatan ekonomi.¹⁴

Ukuran perusahaan ialah satu faktor yang menjadi tolak ukur apakah perusahaan dalam skala besar atau kecil. Besar kecilnya ukuran perusahaan juga dipengaruhi oleh kompleksitas operasional dan intensitas transaksi perusahaan. Perusahaan besar cenderung untuk lebih cepat didalam menyampaikan laporan keuangan, perusahaan dengan total aset banyak memiliki arus kas sehat, sumber daya yang lebih besar, personel akuntansi yang lebih banyak, sistem informasi yang maju, dan sistem

¹² G, D, and Sumilir.

¹³ Hayu and Fadrijih.

¹⁴ Desi Rahmawati and Dhiona Ayu Nani, 'Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Dan Tingkat Hutang Terhadap Tax Avoidance', *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 26.1 (2021), pp. 1–11, doi:10.23960/jak.v26i1.246.

pengendalian internal yang kuat. Sebagai hasil dari kontrol yang ketat oleh otoritas publik, perusahaan yang tergolong besar cenderung meminimalkan kegiatan pajak yang agresif.¹⁵

Ukuran perusahaan ditentukan oleh aset dan volume penjualannya. Perusahaan dengan total aset yang signifikan telah matang, yang berarti arus kasnya menguntungkan dan diantisipasi memiliki prospek masa depan yang kuat. Selain karena mereka memiliki kendali lebih atas keadaan pasar dan tidak terlalu rentan terhadap perubahan ekonomi, perusahaan besar akan lebih stabil daripada perusahaan kecil dan lebih siap untuk bersaing di pasar global.¹⁶

Ukuran perusahaan juga dapat didefinisikan menjadi klasifikasi berdasarkan asetnya. Aset dianggap memiliki tingkat stabilitas jangka panjang, karena semakin besar organisasi, semakin baik dalam mengelola perpajakan dengan menghindari pajak melalui celah yang ada.¹⁷ Satu corak yang dapat dikategorikan bersama dengan semua aset, laba bersih, serta kapitalisasi pasar adalah ukuran bisnis. Bisnis yang lebih besar dijadikan siap agar mempertahankan tingkat profitabilitas bisnis yang stabil daripada yang lebih kecil. Manajer bertujuan menghindari pajak untuk mengurangi beban pajak dan meningkatkan penghasilan bagi pemegang saham untuk menjaga stabilitas keuntungan tersebut. Lebih mudah untuk menghindari membayar pajak semakin besar bisnisnya. Sumber daya lebih berlimpah untuk bisnis lebih kompleks ditimbang yang kecil. Bisnis lebih besar memiliki sistem informasi dan SDM yang lebih baik untuk mesupport aktivitas penghindaran pajak manajer.¹⁸

¹⁵ Gina and Purnama.

¹⁶ Selin Lumoly, Sri Murni, and Victoria N. Untu, 'Pengaruh Likuiditas, Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Pada Perusahaan Logam Dan Sejenisnya Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia)', *Jurnal EMBA*, 6.3 (2018), 1108–17.

¹⁷ Febrilyantri.

¹⁸ Stefanie Martchellia Suteja and others, 'Ukuran Perusahaan, Pertumbuhan Penjualan, Penghindaran Pajak: Bagaimana Peran Tanggung Jawab Sosial Perusahaan?', *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)*, 6.2 (2022), pp. 436–45, doi:10.31092/jpi.v6i2.1833.

Secara umum, perusahaan adalah jenis aktivitas tertentu yang mengubah sumber daya ekonomi menjadi sesuatu yang lebih berharga, seperti komoditas atau layanan, untuk menghasilkan uang atau mencapai tujuan lain. Cara menghitung ukuran perusahaan menggunakan metode di bawah ini¹⁹

$$UkuransPerusahaan = Ln Total Aset$$

5. Dewan Komisaris

Anggota dewan disebut komisaris independen adalah seseorang yang bukan merupakan emiten dan dipilih oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) melalui aturan dan pedoman yang diatur dalam Otoritas Jasa Keuangan No.55/POJK.04/2015. Komisaris independen pada bisnis mungkin tak berteman dekat dengan anggota dewan atau pemegang saham yang signifikan. Peran komisaris independen agar bisa berdampak secara efisien kepada hasil akhir *annual report* bisnis berkualitas atau berpotensi bebas dari keburukan. Komisaris independen juga dapat menjadi sebagai pihak ke tiga dalam konflik manajemen dalam, mengawasi keputusan manajemen, dan menawarkan nasihat manajemen.²⁰

Sesuai BEI, Komisaris independen ialah seseorang yang tidak punya ikatan dengan pengendali saham, tidak punya ikatan dengan komisaris atau direktur lain, dan tidak menjabat sebagai pengurus perusahaan yang terkait dengan bisnis pemilik. Selanjutnya, komisaris independen diusulkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) oleh pemegang saham yang bukan merupakan pemegang saham pengendali, dengan ketentuan proporsi komisaris independen paling kecil 30% dari semua anggota. Komisaris independen memiliki pengetahuan tentang hukum dan

¹⁹ Vicka Stawati, 'Pengaruh Profitabilitas, Leverage Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak', *JURNAL AKUNTANSI DAN BISNIS Jurnal Program Studi Akuntansi*, 6.November (2020), pp. 147–57, doi:10.31289/jab.v6i2.3472.

²⁰ Dudi Pratomo and Risa Aulia Rana, 'Pengaruh Kepemilikan Instusional, Komisaris Independen Dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak', *JAK (Jurnal Akuntansi) Kajian Ilmiah Akuntansi*, 8.1 (2021), pp. 91–103, doi:10.30656/jak.v8i1.2487.

peraturan pasar modal. Jumlah saham pemilik nonpengendali berbanding terbalik dengan jumlah komisaris independen²¹

Anggota yang ditunjuk mewakili pemegang saham independen yang bebas akan segala ikatan yang membatasi kemampuannya untuk bertindak independen, seperti yang dimiliki oleh anggota, komisaris lain, atau pemegang saham pengendali, disebut sebagai komisaris independen.. Untuk meningkatkan kehati-hatian dalam pengambilan keputusan dan mengurangi aktivitas penghindaran pajak, kinerja manajemen perusahaan diatur lebih ketat dengan komisaris yang lebih independen²²

Badan hukum yang dipercayakan untuk mengawasi serta mengasahi nasihat untuk direksi adalah dewan komisaris. Komisaris independen dan asosiasi, atau komisaris yang bukan pihak terkait, dapat menjadi dewan komisaris. Dewan komisaris berperan penting pelaksanaan tata kelola perusahaan karena tidak adanya dewan komisaris yang independen tidak dapat memastikan bahwa prinsip-prinsipnya, terutama perlindungan investor. Perbandingan persentase antara jumlah komisaris independen dan tingkat pengendalian manajemen perusahaan disediakan oleh dewan komisaris independen.²³ Dewan komisaris bertugas untuk mengawasi tindakan yang diambil oleh direksi dan manajemen untuk pengelolaan sumber daya alam untuk memastikan bahwa mereka beroperasi dengan sukses dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi dan untuk memberikan bimbingan yang diperlukan.

Perusahaan tercatat di BEI wajib punya komisaris independen dengan keterwakilan paling kecil 30% lebih tinggi akan saham yang dipunyai bukan pemegang saham. Komisaris tidak memihak ini tidak memiliki kekuasaan atas uang, kepemimpinan, kepemilikan saham, atau koneksi lain yang mungkin berdampak pada operasi yang tidak memihak. Studi ini komisaris independen ditentukan melalui cara

²¹ Kevin Honggo and Aan Marlinah, 'Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Sales Growth, Dan Leverage', *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 21.1 (2019), pp. 9–26.

²² Sidauruk and Putri.

²³ Marlinda, Titisari, and Masitoh.

membagi kepersertaan komisaris independen dengan kepersertaan komisaris korporasi.²⁴

$$\text{Komisaris Independen} = \frac{\text{jumlah komisaris independen} \times 100\%}{\text{total anggota dewan komisaris}}$$

6. Komite Audit

Dewan komisaris perusahaan wajib membentuk, mengangkat, dan memberhentikan komite audit, sesuai POJK No.55/POJK 04/2015. Diperlukan minimal tiga anggota, tiga di antaranya harus komisaris independen yang juga akan memimpin komite audit dan dua lainnya harus orang luar yang tidak memihak. Korporasi membentuk komite audit yang salah satu fungsinya membantu dalam melakukan penelitian atau pemeriksaan atas penerapan tanggung jawab untuk menjalankan bisnis terbuka secara professional.

Komitesaudit punya tanggung jawab pemantauan akan catatan keuangan organisasi, konflik kepentingan, dan kecurangan yang dilakukan oleh anggota staf atau manajemen. Ringkasan komite audit dalam laporan keuangan memberikan informasi yang dapat digunakan sebagai alat ukur untuk mengidentifikasi komite audit.²⁵ Para manajer yang memiliki suara dalam memutuskan kebijakan perusahaan termasuk komite audit. Karena fakta bahwa memiliki komite audit memberikan ketenangan pikiran bagi investor ketika berinvestasi di suatu perusahaan, komite audit harus sangat berpengalaman dan punya skill pada bagian keuangan.²⁶

Fungsi dari komite audit yaitu menjadi pemantau dalam pembuatan laporan keuangan dan pemantauan dalam. Komite audit dapat memproses calon auditor termasuk jasa

²⁴ Windarni Nunung, Nurlaela Siti, and Suhendro, 'Pengaruh Kepemilikan Instutisional, Proporsi Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Pertumbuhan Penjualan Dan Laverage Terhadap Tax Avoidance', *Manajemen, Akuntansi Dan Pvrbankan*, 15,16, 2018, pp. 74–90.

²⁵ Pratomo and Risa Aulia Rana.

²⁶ Muhammad Taufiqul Hafizh and Laely Aghe Africa, 'Pengaruh Intensitas Aset Tetap, Pertumbuhan Penjualan, Kepemilikan Instutisional Dan Komite Audit Terhadap Tax Avoidance', *Journal of Accounting and Financial Issue (JAFIS)*, 3.2 (2022), pp. 27–40, doi:10.24929/jafis.v3i2.2277.

imbalannya yang disampaikan kepada dewan komisaris selaku pengawas.²⁷ Komite audit dipercaya memberikan usulan profesional yang tidak memihak ke seluruh Dewan Komisaris untuk meninjau sesuatu yang telah diteruskan kepada Direksi kepada panel Komisaris dan mengidentifikasi masalah yang membutuhkan perhatian khusus Dewan Komisaris.²⁸

Komite audit juga bertugas untuk menentukan hal-hal yang perlu menjadi perhatian komisaris, memberi nasihat untuk dewan komisaris dari masalah yang diberikan oleh direksi, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan wewenang komisaris. Komite audit, salah satu entitas perusahaan yang diperlukan untuk tata kelola perusahaan yang sukses, sangat penting untuk prosedur ini. Karena persyaratan BEI bahwa seluruh cabang membentuk dan memelihara komite audit hanya diketahui seseorang komisaris independen, komite ini seringkali berfungsi sebagai pengawas proses tinjauan internal dan penyusunan laporan keuangan.²⁹

Sebuah komite audit biasanya terdiri tiga sampai lima, dan terkadang tujuh, anggota independen dari manajemen bisnis. Karena komite audit berfungsi sebagai penghubung antara auditor eksternal dan internal, sangat penting untuk bersikap objektif, independen terhadap dewan direksi, auditor eksternal atau internal, dan bertanggung jawab secara eksklusif ke dewan komisaris. Komite audit dinilai berdasarkan total komite audit yang dimiliki perusahaan pada suatu saat.³⁰

$$\text{Komite Audit} = \sum \text{komite audit dalam satu periode}$$

²⁷ Nunung, Siti, and Suhendro.

²⁸ Suryani, 'Pengaruh Ukuran Perusahaan, Return On Asset, Dvbt To Asset Ratio, Dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak', *Jurnal Online Insan Akuntan*, 5.1 (2020), pp. 83–98.

²⁹ Honggo and Marlinah.

³⁰ Marlinda, Titisari, and Masitoh.

B. Penelitian Terdahulu

Untuk pedoman landasan teori, berikut ini disajikan hasil studi terdahulu yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi :

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Sub Unsur	Keterangan
1.	Penulis	Dea Hayu Sarasati, Nur Fadjrih Asyik
	Tahun	2018
	Judul	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> , Profitabilitas, Likuiditas, dan Ukuran Perusahaan terhadap <i>Tax Avoidance</i>
	Metode	Data yang digunakan bersumber dari laporan keuangan tahun 2014-2016 yang dipublikasikan di BEI. Metode pengukuran <i>tax avoidance</i> mengacu pada CETR.
	Hasil	Hasil penelitian menunjukkan bahwa: <ol style="list-style-type: none"> 1. komisaris independent berpengaruh negatif dan signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>. 2. Komite audit berpengaruh negative dan signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>. 3. Likuiditas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>. 4. Ukuran perusahaan tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>.
	Persamaan	Meneliti pengaruh likuiditas, ukuran perusahaan, komisaris independent dan komite audit terhadap <i>tax avoidance</i> .
	Perbedaan	Pada penelitian sendiri menggunakan objek perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia. Sedangkan pada peneliti terdahulu pada perusahaan manufaktur yang <i>listed</i> dalam <i>website</i> BEI. Dan periode tahun penelitian yang berbeda.
2.	Penulis	Sri Mulyani, Anita Wijayanti, Endang Masitoh
	Tahun	2018

	Judul	Pengaruh <i>Corporate Governance</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i> (Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di BEI)
	Metode	Data yang digunakan bersumber dari laporan keuangan perusahaan mulai tahun 2014-2016 yang dipublikasikan di BEI. Metode pengukuran <i>tax avoidance</i> mengacu pada komisaris independen dan komite audit.
	Hasil	Hasil penelitian menunjukkan bahwa: <ol style="list-style-type: none"> 1. komisaris independen berpengaruh negatif dan signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>. 2. Komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>.
	Persamaan	Meneliti pengaruh komisaris independen dan komite audit terhadap <i>tax avoidance</i> .
	Perbedaan	Pada penelitian peneliti sendiri menggunakan objek perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia. Pengukuran <i>tax avoidance</i> dari aspek likuiditas, ukuran perusahaan, komisaris independen, dan komite audit.
3.	Penulis	Rai Gina Artaningrum, Ni Luh Putu Sri PurnPradnyani
	Tahun	2020
	Judul	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> , Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan terhadap <i>Tax Avoidance</i>
	Metode	Data yang digunakan bersumber dari laporan keuangan dari perusahaan yang bergerak dari sektor perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2019. Objek penelitian berfokus pada ukuran perusahaan, dewan komisaris dan komite audit.
	Hasil	Hasil penelitian menunjukkan bahwa: <ol style="list-style-type: none"> 1. Ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i>. 2. Komisaris independen berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i>. 3. Komite audit berpengaruh positif

		terhadap <i>tax avoidance</i> .
	Persamaan	Meneliti pengaruh ukuran perusahaan, komisaris independen, dan komite audit terhadap <i>tax avoidance</i> .
	Perbedaan	Pada penelitian peneliti menggunakan perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia.
4.	Penulis	Dian Eva Marlinda, Kartika Hendra Titisari, Endang Masitoh
	Tahun	2020
	Judul	Pengaruh <i>GCG</i> , Profitabilitas, <i>Capital Intensity</i> , dan Ukuran Perusahaan terhadap <i>Tax Avoidance</i>
	Metode	Data yang digunakan seluruh perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di BEI periode 2016-2018. Objek penelitian berfokus pada dewan komisaris independent, kepemilikan instutisional, komite audit, profitabilitas, <i>capital intensity</i> , dan ukuran perusahaan.
	Hasil	Hasil penelitian menunjukkan bahwa: <ol style="list-style-type: none"> 1. Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>. 2. Dewan komisaris independent tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>. 3. Komite audit berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>.
	Persamaan	Meneliti pengaruh ukuran perusahaan, komisaris independent, dan komite audit terhadap <i>tax avoidance</i> .
	Perbedaan	Pada penelitian peneliti menggunakan perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia.
5.	Penulis	Afriyanti Hasanah, Cindy Oktami, Afdaleni
	Tahun	2021
	Judul	Analisis Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i>
	Metode	Data yang digunakan bersumber dari laporan tahunan periode 2013-2017 yang

		dipublikasikan di BEI. Model Pengukuran <i>tax avoidance</i> mengacu pada ukuran perusahaan.
	Hasil	Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> .
	Persamaan	Meneliti tentang pengaruh ukuran perusahaan terhadap <i>tax avoidance</i> .
	Perbedaan	Pada penelitian peneliti sendiri hanya mengambil objek ukuran perusahaan.
6.	Penulis	M. G. Prasetyo, D. Ariefiara, Sumilir
	Tahun	2022
	Judul	Pengaruh Profitabilitas, Transfer Pricing, dan Likuiditas terhadap <i>Tax Avoidance</i>
	Metode	Data yang digunakan bersumber dari BEI yang dipublikasikan periode 2017-2019. Pemilihan sampel dengan metode <i>purposive sampling</i> melalui kriteria <i>annual report</i> .
	Hasil	Hasil menunjukkan bahwa likuiditas berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> .
	Persamaan	Meneliti pengaruh likuiditas terhadap <i>tax avoidance</i> pada perusahaan manufaktur yang laporan keuangannya dipublikasikan di BEI.
	Perbedaan	Pada penelitian peneliti hanya menggunakan variabel likuiditas saja.
7.	Penulis	Tresna Syah Rozak, Arief Tri Hardiyanto, Haqi Fadilah
	Tahun	2018
	Judul	Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, dan Leverage terhadap <i>Tax Avoidance</i> (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Sektor Aneka Industri yang tercatat pada BEI 2013-2017)
	Metode	Data yang digunakan bersumber dari perusahaan manufaktur sektor aneka industri tahun 2013-2017 yang dipublikasikan di BEI. Menggunakan metode <i>purposive sampling</i> .
	Hasil	Hasil menunjukkan bahwa variabel likuiditas

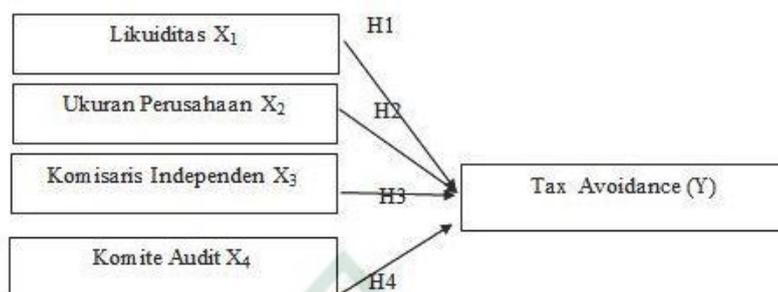
		tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> .
	Persamaan	Meneliti pengaruh likuiditas terhadap <i>tax avoidance</i> yang laporan keuangannya dipublikasikan di BEI.
	Perbedaan	Pada penelitian peneliti hanya menggunakan variabel likuiditas. Dan pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada variabel yang digunakan dan perusahaan ada yang berbeda. Kebaharuan dalam penelitian ini, penulis menggunakan periode tahun 2019-2021. Alasan penulis memilih variabel ini karena adanya perbedaan dari hasil penelitian.

C. Kerangka Berfikir

Teori kepatuhan menyatakan bahwa implementasi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sebagai bentuk tanggungjawab. Menurut teori kepatuhan, pembayar pajak harus memenuhi kewajiban pajak mereka dan mengklaim semua keuntungan pajak mereka. Kepatuhan yang menjabarkan sebuah kondisi yang mana wajib pajak memiliki kewajiban terhadap perpajakan. kewajiban perpajakan yang berlandaskan aturan perundangan yang sudah diputuskan. Teori kepatuhan mendorong wajib pajak untuk mengikuti peraturan yang berlaku lebih dekat, termasuk penghindaran pajak. Jika wajib pajak patuh menyelesaikan kewajiban pajaknya, maka penerima pajak negara juga akan tinggi, dan penerima yang tinggi pasti akan berdampak positif bagi negara dan masyarakat.

Kerangka berfikir yaitu suatu proses yang menerangkan metode riset secara menyeluruh. Kerangka berpikir menggambarkan keterkaitan antar variabel yang diteliti. Konsep berpikir pada penelitian ini yaitu likuiditas (X_1), ukuran perusahaan (X_2), komisaris independen (X_3), komite audit (X_4), berpengaruh terhadap *tax avoidance* (Y). berikut penggambaran modelnya:



Gambar 2. 1 Kerangka Berfikir

H1: Pengaruh Likuiditas (X_1) terhadap Tax Avoidance (Y)

H2 : Pengaruh Ukuran Perusahaan (X_2) terhadap Tax Avoidance (Y)

H3: Pengaruh Komisaris Independen (X_3) terhadap Tax Avoidance (Y)

H4: Pengaruh Komite Audit (X_4) terhadap Tax Avoidance (Y)

D. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban atau kesimpulan sementara dalam penelitian. Hipotesis biasanya disusun berdasarkan teori-teori yang ada dan dapat disusun secara deduktif. Hipotesis yang telah disusun berdasarkan fakta-fakta yang dirangkum terhadap tinjauan Pustaka dan analisis dari berbagai hasil penelitian yang memperoleh kesimpulan yang masih membutuhkan pembuktian. Maka hipotesis dari penelitian ini yaitu:³¹

1. Likuiditas terhadap Tax Avoidance

Likuiditas adalah ukuran kemampuan bisnis membayar komitmen waktu pendek. Kemungkinan penghindaran pajak akan berkurang semakin besar rasio likuiditas menampilkan bisnis memiliki posisi keuangan yang sehat dan dapat memenuhi kewajiban perpajakannya.

Likuiditas berdampak buruk pada penghindaran pajak. Pendapat tersebut didukung dengan hasil penelitian Devi (2023).³² dan Wijaya (2022) yang menyatakan

³¹ Urip Santoso, *Kiat Menyusun Proposal Penelitian*, 2015.

³² Devi, Sudiartana, and Dewi.

likuiditas berdampak negatif terhadap *tax avoidance*.³³ Sedangkan menurut penelitian Prasetyo (2022)³⁴ menyatakan bahwasannya likuiditas berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sesuai hipotesis tersebut studi yaitu:

H1 : Likuiditas tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*

2. Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance

Peluang penghindaran pajak dalam korporasi meningkat seiring dengan besarnya perusahaan. Untuk beberapa tujuan, perusahaan besar akan memiliki banyak sekali aset untuk dibuang, termasuk meminimalkan beban pajak atau memaksimalkan kemampuan mereka untuk menghasilkan keuntungan.

Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Pendapat tersebut didukung dengan hasil penelitian Oktavia ((2021)³⁵ yang menyatakan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan menurut penelitian Setyowati (2022)³⁶ menunjukkan ukuran perusahaan berpengaruh kecil terhadap penghindaran pajak, didukung oleh penelitian Devi (2023)³⁷ yang menyatakan hal serupa bahwa ukuran perusahaan tak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sesuai penjabaran tersebut, hipotesis pada studi yaitu:

H2 : Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*

³³ Wijaya Angel Meta.

³⁴ G, D, and Sumilir.

³⁵ Vivi Oktavia, Jefri Ulfi, and Jaka wijaya Kusuma, 'Pengaruh Good Corporate Governance Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance (Pada Perusahaan Properti Dan Real Estate Yang Terdaftar Di BEI Periode 2015 - 2018)', *Jurnal Revenue*, 01.02 (2020), pp. 143–51.

³⁶ Indah Dwi Setyowati and Andri Octaviani, 'Analisis Return On Asset, Leverage Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance Pada Pe- Rusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2016-2019', *Advance: Jurnal Akuntansi Analisis Return On Asset, Leverage Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance Pada Pe- Rusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2016-2019*, 9.1 (2022), pp. 10–17 <<https://e-journal.stie-aub.ac.id/index.php/advance>>.

³⁷ Devi, Sudiartana, and Dewi.

3. Komisaris Independen terhadap *Tax Avoidance*

Komisaris muncul setelah pemegang saham dalam hierarki manajemen. Salah satu elemen terpenting dalam tata kelola bisnis adalah dewan komisaris independen. Karena ketika korporasi menetapkan tujuannya, sesuai hukum diharuskan agar berkonsentrasi terhadap urusan bisnis di hadapan dewan komisaris. Buat kebijakan menyeluruh dan pekerjakan staf untuk melakukan maksud serta kebijakan yang telah ditetapkan. Dewan komisaris adalah sekelompok orang memiliki tanggung jawab kolektif kepada perusahaan untuk mengawasi, mengevaluasi kinerja, memastikan bisnis berjalan baik dan menjaga kepentingan pemegang saham. Selain itu, dewan komisaris menasihati dewan direksi dan memastikan agar bisnis sudah mengadopsi tata kelola bisnis yang sangat bagus. Komisaris independen membantu korporasi dalam mengembangkan tujuan jangka panjang, meninjau implementasinya, dan mengurangi penghindaran pajak.

Komisaris independen tidak berpengaruh *tax avoidance*. Pendapat tersebut didukung oleh penelitian Oktavia (2021)³⁸ dan Marlinda (2020)³⁹ yang menyatakan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan penelitian Sarasati (2018)⁴⁰ dan Mulyani (2018)⁴¹ yang menyatakan komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sesuai penjabaran tersebut hipotesis pada studi yaitu:

H3 : Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

4. Komite Audit terhadap *Tax Avoidance*

Komite audit dibentuk oleh dewan komisaris. Panel audit yang diakui secara resmi dengan komisaris dan keahlian luar membentuk komisaris independen. Dalam menjalankan tugasnya, komite audit bertanggung jawab kepada dewan komisaris. Anggota dipilih dan dihentikan oleh Dewan Komisaris.

³⁸ Oktavia, Ulfi, and Kusuma.

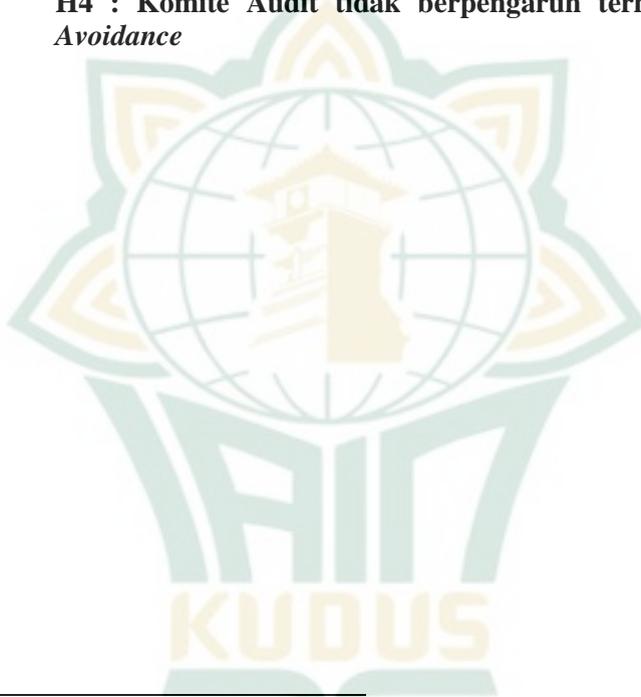
³⁹ Marlinda, Titisari, and Masitoh.

⁴⁰ Hayu and Fadrijih.

⁴¹ Anita Wijayanti, Endang Masitoh.

Komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Pernyataan tersebut diukung oleh penelitian Ardianti (2019)⁴² dan Dewi (2019)⁴³ yang menyatakan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan penelitian Sahara (2022)⁴⁴ dan Pramasiwari (2022)⁴⁵ menyatakan komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sesuai penjabaran tersebut maka hipotesis pada penelitian ini yaitu:

H4 : Komite Audit tidak berpengaruh terhadap Tax Avoidance



⁴² Putu Novia Hapsari Ardianti, 'Profitabilitas, Leverage, Dan Komite Audit Pada Tax Avoidance', *E-Jurnal Akuntansi*, 26.2019 (2019), p. 2020, doi:10.24843/eja.2019.v26.i03.p13.

⁴³ Noor Mita Dewi, 'Pengaruh Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen Dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016', *Maksimum*, 9.1 (2019), p. 40, doi:10.26714/mki.9.1.2019.40-51.

⁴⁴ Sahara.

⁴⁵ Gelia Ayu Pramaiswari and Fidiana Fidiana, 'Pengaruh Profitabilitas, Capital Intensity Dan Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance', *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan (JIAKu)*, 1.2 (2022), pp. 103–19, doi:10.24034/jiaku.v1i2.5338.